

TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI NAGARI PANYUBARANGAN KECAMATAN TIMPEH

Alifia Ayu Azhara¹

Universitas Bung Hatta

alifiaazzahra869@gmail.com

Wenny Widya Wahyudi²

Universitas Bung Hatta

wennyww4@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya produksi kelapa sawit di Nagari Panyubarangan yang belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan tingkat kesejahteraan petani. Sebagai salah satu sentra produksi kelapa sawit di Kecamatan Timpeh, wilayah ini memiliki luas perkebunan ± 2.200 Ha dengan produksi mencapai 120.000 ton per tahun. Namun, perbedaan status penguasaan lahan, variasi pendapatan, serta kepemilikan aset diduga menyebabkan kesenjangan kesejahteraan antar petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesejahteraan petani perkebunan kelapa sawit. Metode yang digunakan adalah kombinasi analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan teknik pembobotan (skoring) terhadap indikator pendapatan, pengeluaran, luas lahan, dan kepemilikan aset. Data diperoleh melalui survei terhadap 70 responden petani kelapa sawit. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar petani berada pada kategori 3 kesejahteraan sedang, dengan pendapatan dominan pada kisaran Rp500.000–Rp1.500.000 per bulan. Petani pemilik cenderung memiliki tingkat kesejahteraan lebih tinggi dibandingkan petani penggarap, terutama dipengaruhi oleh luas lahan dan kepemilikan aset produktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingginya produksi kelapa sawit tidak secara otomatis menjamin kesejahteraan petani secara merata. Diperlukan penguatan akses terhadap lahan, peningkatan kapasitas ekonomi petani penggarap, serta kebijakan pemerataan berbasis wilayah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan petani di Nagari Panyubarangan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kesejahteraan petani, kelapa sawit, pendapatan, luas lahan, kepemilikan aset

ABSTRACT

This study is motivated by the high level of oil palm production in Nagari Panyubarangan, which has not been fully accompanied by an equitable distribution of farmers' welfare. As one of the oil palm production centers in Kecamatan Timpeh, this area covers approximately $\pm 2,200$ hectares of plantation land with an annual production reaching 120,000 tons. However, differences in land tenure status, income variation, and asset ownership are presumed to contribute to welfare disparities among farmers. This study aims to identify the welfare level of oil palm plantation farmers. The method used is a combination of qualitative

and quantitative descriptive analysis with a scoring technique applied to indicators of income, expenditure, land area, and asset ownership. Data were collected through a survey of 70 oil palm farmers. The results show that the majority of farmers fall into the moderate welfare category (Category 3), with dominant monthly incomes ranging from IDR 500,000 to IDR 1,500,000. Land-owning farmers tend to have higher welfare levels compared to tenant farmers, mainly influenced by larger landholdings and ownership of productive assets. The study concludes that high oil palm production does not automatically guarantee equitable farmer welfare. Strengthening access to land, improving the economic capacity of tenant farmers, and implementing region-based equity policies are necessary to promote sustainable welfare improvement among farmers in Nagari Panyubarangan.

Keyword: farmer welfare, oil palm, income, land area, asset ownership

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah perdesaan memiliki keterkaitan erat dengan sektor pertanian sebagai sumber utama penghidupan masyarakat. Dalam perspektif pembangunan ekonomi, pertumbuhan sektor pertanian diharapkan mampu meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Menurut Michael P. Todaro dan Smith (2011), kesejahteraan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan pendapatan riil, pemerataan distribusi pendapatan, serta penurunan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan sektor pertanian tidak hanya dinilai dari besarnya produksi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan rumah tangga petani.

Secara nasional, subsektor perkebunan menjadi salah satu penopang utama ekonomi wilayah. Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di berbagai daerah, khususnya di Sumatera. Namun demikian, tingginya kontribusi ekonomi tersebut belum tentu mencerminkan pemerataan kesejahteraan di tingkat petani. Perbedaan penguasaan lahan, akses terhadap modal, serta kepemilikan aset produktif sering kali menjadi faktor pembeda tingkat kesejahteraan antar rumah tangga petani.

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu daerah dengan potensi perkebunan kelapa sawit yang besar di Sumatera Barat. Di wilayah Kecamatan Timpeh, Nagari Panyubarangan tercatat memiliki luas perkebunan sekitar ± 2.200 Ha dengan produksi mencapai 120.000 ton per tahun. Secara makro, kondisi ini menunjukkan potensi ekonomi wilayah yang kuat. Akan tetapi, secara mikro, masih terdapat variasi tingkat kesejahteraan petani yang dipengaruhi oleh pendapatan, pengeluaran rumah tangga, luas lahan yang dikelola, serta kepemilikan aset seperti rumah, kendaraan, ternak, dan tabungan.

Dalam konteks perencanaan wilayah, analisis tingkat kesejahteraan menjadi penting untuk menilai sejauh mana sektor unggulan daerah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan rumah tangga menurut indikator sosial ekonomi umumnya diukur melalui kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, kestabilan pendapatan, serta kepemilikan aset yang mencerminkan ketahanan ekonomi. Tanpa adanya pengukuran yang sistematis, potensi ekonomi wilayah dapat berkembang tanpa disertai pemerataan manfaat bagi masyarakat lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan petani perkebunan kelapa sawit di Nagari Panyubarangan berdasarkan indikator pendapatan, pengeluaran, luas lahan, dan kepemilikan aset. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian kesejahteraan berbasis wilayah perdesaan, menjadi bahan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani, serta mendukung terwujudnya pembangunan wilayah yang lebih

inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang didukung oleh penjelasan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur dan menganalisis tingkat kesejahteraan petani berdasarkan data numerik yang diperoleh melalui survei lapangan, sehingga hasil penelitian bersifat objektif dan terukur. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan kondisi sosial ekonomi petani secara deskriptif berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan. Kombinasi kedua pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kesejahteraan petani perkebunan kelapa sawit (Sugiyono, 2018).

Secara teoritis, penelitian ini mengacu pada konsep kesejahteraan rumah tangga dalam pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Michael P. Todaro dan Smith (2011), yang menekankan bahwa kesejahteraan diukur melalui peningkatan pendapatan, kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, serta kepemilikan sumber daya ekonomi. Selain itu, indikator kesejahteraan juga merujuk pada pendekatan sosial ekonomi yang umum digunakan oleh Badan Pusat Statistik, yang mencakup aspek pendapatan, pengeluaran, serta kepemilikan aset sebagai cerminan kondisi ekonomi rumah tangga.

Lokasi penelitian berada di Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 200 petani kelapa sawit. Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 70 responden yang terdiri dari petani pemilik, petani penggarap, dan petani pemilik-penggarap. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei kuesioner, wawancara, dan dokumentasi.

Metode analisis dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi pendapatan, pengeluaran, luas lahan, dan kepemilikan aset petani tanpa melakukan generalisasi di luar sampel penelitian. Kedua, analisis skoring (pembobotan) untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani berdasarkan kategori tertentu pada setiap indikator. Setiap variabel diberikan skor 0–4 sesuai dengan tingkat capaian, kemudian dijumlahkan untuk menentukan kategori kesejahteraan (rendah, sedang, dan tinggi). Ketiga, dilakukan analisis komparatif sederhana untuk melihat perbedaan tingkat kesejahteraan berdasarkan status penguasaan lahan.

Tahapan analisis tersebut bertujuan untuk menghasilkan pengukuran tingkat kesejahteraan yang sistematis dan terukur, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi kesejahteraan petani kelapa sawit di Nagari Panyubarangan serta menjadi dasar dalam perumusan rekomendasi kebijakan pembangunan wilayah berbasis sektor perkebunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Gambaran Umum Kondisi Petani Kelapa Sawit.

a. Analisis Pendapatan Petani

Tabel 1 Pendapatan Petani Kelapa Sawit

Rentang Pendapatan	Kategori	Kategori Petani			Jumlah
		Petani pemilik	Petani penggarap	Petani pemilik-penggarap	
≤ Rp. 500.000	1	5	7	1	13
Rp. 500.000-1.000.000	2	14	10	2	26
Rp. 1.000.000-1.500.000	3	13	3	8	24
Rp. 1.500.000-2.000.000	4	6	-	1	7
Lebih dari Rp. 2.000.000	5	-	-	-	-

Rentang Pendapatan	Kategori	Kategori Petani			Jumlah
		Petani pemilik	Petani penggarap	Petani pemilik-penggarap	
Total		38	20	12	70

Sumber : Hasil Survey 2025

Pendapatan petani perkebunan kelapa sawit di Nagari Panyubarangan tersebar pada beberapa kategori pendapatan. Jumlah pendapatan petani terbanyak berada pada Kategori 2 (Rp500.000–1.000.000), yaitu sebanyak 26 orang.

b. Analisis Berdasarkan Luas Lahan

Pada analisis luas lahan garapan petani ini luas lahan dilihat berdasarkan masing-masing kategori petani, terdiri 3 kategori :

Tabel 2 Luas Lahan Garapan Milik Sendiri

Luas Lahan (Ha)	Kategori	Kategori Petani		
		Petani Pemilik	Petani Penggarap	Petani Pemilik-Penggarap
Tidak Ada	0	18	20	-
< 0,25 Ha	1	9	-	5
0,26 Ha - < 0,49 Ha	2	7	-	4
0,5 Ha - < 0,99 Ha	3	2	-	1
1 Ha - < 2 Ha	4	2	-	2
Total		38	20	12

Sumber : Hasil Survey 2025

Hal ini menegaskan bahwa status kepemilikan lahan sangat membedakan kondisi petani, di mana penggarap sepenuhnya bergantung pada lahan orang lain, sementara pemilik dan pemilik-penggarap relatif lebih mandiri dalam pengelolaan kebunnya.

Tabel 3 Luas Lahan Garapan Milik Sewa

Luas Lahan (Ha)	Kategori	Kategori Petani		
		Petani Pemilik	Petani Penggarap	Petani Pemilik Penggarap
Tidak Ada	0	38	4	1
< 0,25 Ha	1	-	5	2
0,26 Ha - < 0,49 Ha	2	-	7	6
0,5 Ha - < 0,99 Ha	3	-	3	2
1 Ha - < 2 Ha	4	-	1	1
Total		38	20	12

Sumber : Hasil Survey 2025

Dapat diketahui bahwa seluruh petani pemilik tidak menggarap lahan sewa, karena mereka sudah memiliki lahan pribadi. Sebaliknya, penggunaan lahan sewa lebih banyak dilakukan oleh petani penggarap dan petani pemilik-penggarap.

Tabel 4 Luas Lahan Garapan Milik Keluarga

Luas Lahan (HaS)	Kategori	Kategori Petani		
		Petani Pemilik	Petani Penggarap	Petani Pemilik-Penggarap
Tidak Ada	0	38	16	7
< 0,25 Ha	1	-	-	1
0,26 Ha - < 0,49 Ha	2	-	2	2
0,5 Ha - < 0,99 Ha	3	-	1	1
1 Ha - < 2 Ha	4	-	1	1

Luas Lahan (HaS)	Kategori	Kategori Petani		
		Petani Pemilik	Petani Penggarap	Petani Pemilik- Penggarap
Total		38	20	12

Sumber : Hasil Survey 2025

Hasil ini menunjukkan bahwa petani penggarap dan pemilik-penggarap sebagian masih bergantung pada lahan keluarga untuk menjalankan usaha perkebunan sawit. Namun, jumlahnya relatif terbatas dan skala lahan yang digarap cenderung kecil.

c. Analisis Berdasarkan Kepemilikan Aset

Kepemilikan aset dalam penelitian ini lebih difokuskan pada kepemilikan aset yang bernilai paling tinggi dan aset yang dimiliki diharapkan dapat membantu menambah pendapatan petani perkebunan.

Tabel 5 Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor

No	Kendaraan Bermotor	Kategori Petani			Jumlah	Prensentasi
		Petani Pemilik	Petani Penggarap	Petani Pemilik-Penggarap		
1	Sepeda Motor	34	19	11	64	91,43%
2	Mobil	4	-	1	5	7,14%
3	Tidak Ada	-	1	-	1	1,43%
Total		38	20	12	70	100%

Sumber : Hasil Survey 2025

Tabel 6 Jumlah Kepemilikan Hewan Ternak

No	Hewan Ternak	Kategori Petani			Jumlah	Prensentasi
		Petani Pemilik	Petani Penggarap	Petani Pemilik-Penggarap		
1	Sapi	18	2	3	23	32,86%
2	Kerbau	4	-	2	6	8,57%
3	Ayam	9	2	3	14	20,00%
4	Tidak Ada	7	16	4	27	38,57%
Total		38	20	12	70	100%

Sumber : Hasil Survey 2025

Tabel 7 Jumlah Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal Sekarang

No	Kepemilikan Rumah	Kategori Petani			Jumlah	Prensentasi
		Petani Pemilik	Petani Penggarap	Petani Pemilik-Penggarap		
1	Milik sendiri	28	15	9	52	74,29%
2	Milik keluarga	10	5	3	18	25,71%
Total		38	20	12	70	100%

Sumber : Hasil Survey 2025

Tabel 8 Jumlah Kepemilikan Tabungan/Emas 500.000

No	Kepemilikan Tabungan/emas	Kategori Petani			Jumlah	Prensentasi
		Petani Pemilik	Petani Penggarap	Petani Pemilik-Penggarap		
1	Ada	10	2	3	15	21,43%
2	Tidak Ada	28	18	9	55	78,57%
Total		38	20	12	70	100%

Sumber : Hasil Survey 2025

2. Analisis Tingkat Kesejahteraan Petani Perkebunan Kelapa Sawit

a. Tingkat Kesejahteraan pada Pendapatan $\leq$ Rp500.000

Pada pendapatan kurang dari Rp500.000 per bulan, tingkat kesejahteraan dianalisis berdasarkan beberapa indikator sosial ekonomi, yaitu luas lahan, kepemilikan rumah, kendaraan bermotor, hewan ternak, serta tabungan atau emas. Jumlah dan persentase masing-masing indikator kesejahteraan pada pendapatan $\leq$ Rp500.000 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Pendapatan $\leq$ Rp500.000

No	Indikator	Kondisi	Jumlah Petani	Persentase (%)
1	Luas lahan	< 0,25 Ha	11	84,6%
		0,26–<0,49 Ha	1	7,7%
		Tidak ada	1	7,7%
2	Kepemilikan rumah	Memiliki rumah sendiri	9	69,2%
		Rumah milik keluarga	4	30,8%
3	Kendaraan bermotor	Memiliki sepeda motor	12	92,3%
		Tidak memiliki kendaraan	1	7,7%
4	Hewan ternak	Memiliki hewan ternak	4	30,8%
		Tidak memiliki hewan ternak	9	69,2%
5	Tabungan/emas	Memiliki tabungan/emas $\geq$ 500.000	2	15,4%
		Tidak memiliki tabungan/emas	11	84,6%

Sumber : Hasil Survey 2025

Pada pendapatan $\leq$ Rp500.000 memiliki luas lahan kurang dari 0,25 Ha yaitu sebesar 84,6%, bahkan terdapat 7,7% yang tidak ada data luas lahan. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan aset produktif sebagai sumber utama pendapatan.

Dari aspek kepemilikan rumah, 69,2% petani telah memiliki rumah sendiri, sementara 30,8% masih menempati rumah milik keluarga. Untuk kepemilikan kendaraan, hampir seluruh responden (92,3%) memiliki sepeda motor yang digunakan sebagai sarana mobilitas kerja. Namun demikian, indikator kesejahteraan lainnya masih tergolong rendah. Hanya 30,8% yang memiliki hewan ternak, dan lebih sedikit lagi (15,4%) yang memiliki tabungan atau emas senilai $\geq$ Rp500.000.

b. Tingkat Kesejahteraan pada Pendapatan Rp500.000–Rp1.000.000

Tabel 2 Pendapatan Rp500.000–Rp1.000.000

No	Indikator	Kondisi	Jumlah Petani	Persentase (%)
1	Luas lahan	< 0,25 Ha	8	30,8%
		0,26–<0,49 Ha	13	50,0%
		0,5–<0,99 Ha	3	11,5%
		Tidak ada	2	7,7%
2	Kepemilikan rumah	Memiliki rumah sendiri	16	61,5%
		Rumah milik keluarga	10	38,5%
3	Kendaraan bermotor	Memiliki sepeda motor	25	96,2%
		Tidak memiliki kendaraan	1	3,8%
4	Hewan ternak	Memiliki hewan ternak	11	42,3%

No	Indikator	Kondisi	Jumlah Petani	Persentase (%)
		Tidak memiliki hewan ternak	15	57,7%
5	Tabungan/emas	Memiliki tabungan/emas ≥ 500.000	4	15,4%
		Tidak memiliki tabungan/emas	22	84,6%

Sumber : Hasil Survey 2025

Pada kategori Rp500.000–Rp1.000.000, distribusi luas lahan mulai bergeser ke 0,26–<0,49 Ha, namun kemampuan menabung masih berada pada tingkat yang sama dengan kategori sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan pada rentang tersebut belum berdampak signifikan terhadap peningkatan ketahanan ekonomi.

c. Tingkat Kesejahteraan pada Pendapatan Rp1.000.000–Rp1.500.000

Tabel 3 Pendapatan Rp1.000.000–Rp1.500.000

No	Indikator	Kondisi	Jumlah Petani	Persentase (%)
1	Luas lahan	< 0,25 Ha	5	20,8%
		0,26–<0,49 Ha	12	50,0%
		0,5–<0,99 Ha	4	16,7%
		1–<2 Ha	2	8,3%
		Tidak ada	1	4,2%
2	Kepemilikan rumah	Memiliki rumah sendiri	19	79,2%
		Rumah milik keluarga	5	20,8%
3	Kendaraan bermotor	Sepeda motor	23	95,8%
		Mobil pickup	1	4,2%
4	Hewan ternak	Memiliki hewan ternak	16	66,7%
		Tidak memiliki hewan ternak	8	33,3%
5	Tabungan/emas	Memiliki tabungan/emas ≥ 500.000	6	25,0%
		Tidak memiliki tabungan/emas	18	75,0%

Sumber : Hasil Survey 2025

Perbaikan yang lebih jelas terlihat pada kategori Rp1.000.000–Rp1.500.000, di mana kepemilikan rumah, ternak, dan tabungan mengalami peningkatan.

d. Tingkat Kesejahteraan pada Pendapatan Rp1.500.000–Rp2.000.000

Tabel 4 Pendapatan Rp1.500.000–Rp2.000.000

No	Indikator	Kondisi	Jumlah Petani	Persentase (%)
1	Luas Lahan	0,26–<0,49 Ha	3	42,9%
		0,5–<0,99 Ha	1	14,3%
		1–<2 Ha	3	42,9%
2	Kepemilikan rumah	Memiliki rumah sendiri	6	85,7%
		Rumah milik keluarga	1	14,3%
3	Kendaraan bermotor	Sepeda motor	4	57,1%
		Mobil pickup	3	42,9%
4	Hewan ternak	Memiliki hewan ternak	5	71,4%
		Tidak memiliki hewan ternak	2	28,6%
5	Tabungan/emas	Memiliki tabungan/emas ≥ 500.000	4	57,1%

No	Indikator	Kondisi	Jumlah Petani	Persentase (%)
		Tidak memiliki tabungan/emas	3	42,9%

Sumber : Hasil Survey 2025

pada kategori Rp1.500.000–Rp2.000.000, indikator kesejahteraan menunjukkan kondisi paling baik, terutama pada kepemilikan tabungan yang meningkat secara signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tingkat kesejahteraan petani perkebunan kelapa sawit di Nagari Panyubarangan, ditemukan adanya hubungan yang jelas antara tingkat pendapatan, luas lahan, dan kepemilikan aset sebagai indikator kesejahteraan.

Pada kategori pendapatan < Rp500.000, kesejahteraan petani tergolong paling rendah. Hal ini ditandai dengan dominasi luas lahan sangat sempit (<0,25 Ha) sebesar 84,6%, serta rendahnya kepemilikan ternak (30,8%) dan tabungan (15,4%). Meskipun sebagian besar telah memiliki kendaraan bermotor, kepemilikan tersebut lebih mencerminkan kebutuhan mobilitas dasar dari pada indikator kestabilan ekonomi.

Perubahan yang lebih nyata terlihat pada kategori Rp1.000.000–Rp1.500.000, di mana kepemilikan rumah meningkat menjadi 79,2%, kepemilikan ternak mencapai 66,7%, dan tabungan mulai meningkat menjadi 25,0%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat pendapatan ini, petani mulai mampu memenuhi kebutuhan dasar secara lebih stabil dan membentuk cadangan ekonomi.

Kategori Rp1.500.000–Rp2.000.000 menunjukkan tingkat kesejahteraan tertinggi. Selain peningkatan luas lahan hingga 1–<2 Ha, kepemilikan ternak mencapai 71,4% dan tabungan meningkat signifikan menjadi 57,1%. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa luas lahan dan pendapatan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani. Indikator yang paling membedakan tingkat kesejahteraan antar kelompok pendapatan adalah kemampuan memiliki tabungan, yang meningkat secara konsisten dan signifikan pada kategori pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan petani tidak hanya diukur dari kepemilikan aset fisik seperti rumah dan kendaraan, tetapi juga dari kemampuan menciptakan stabilitas ekonomi petani secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, A. (2018). *Konsep dan Pengertian Petani*. Dalam U. Latifah, Sosiologi Pertanian. Jakarta: Kencana.
- Al Muksit, A. (2017). *Analisis Kemiskinan Rumah Tangga Petani Padi di Desa Taba Padang Kabupaten Bengkulu Tengah*. Skripsi. Universitas Bengkulu.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Kecamatan Timpeh. (2024). *Kecamatan Timpeh dalam Angka 2024*. Dharmasraya: BPS.
- Bappenas. (2020). *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Darwis, V. (2008). *Akses Lahan dan Petani Kecil: Studi Kasus Perkebunan Kelapa Sawit*. Jakarta: Pustaka Agribisnis.

- Dinas Perkebunan Kabupaten Dharmasraya. (2022). *Data Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Dharmasraya*. Dharmasraya: Disbun Dharmasraya.
- Fauzi, R., & Ramdani, R. (2021). *Tantangan Petani Sawit Swadaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan*. Jurnal Pertanian dan Sosial Ekonomi, 19(2), 55–67.
- Firdaus, M. (2012). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gunawan, B. (2017). *Petani Sawit: Antara Swadaya dan Plasma*. Yogyakarta: Agrimedia.
- Kolle, J. (1989). Dalam Rosni (2017). *Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Sosial Ekonomi*. Banda Aceh: CV Nusa Media.
- Maharani, D. (2006). Dalam Al Muksit (2017). *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Bengkulu: UNIB Press.
- Saragih, B. (2020). *Dinamika Industri Kelapa Sawit Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Santoso, S. (2009). *Menguasai Statistik dengan SPSS 17*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Suediyono. (1985). Dalam Al Muksit (2017). *Pemahaman Kesejahteraan Sosial Petani*. Bengkulu: UNIB Press.
- Syechalad, M. N. (2009). *Ekonomi Perkebunan dan Pembangunan Agribisnis*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Wibowo, A. (2017). *Statistika Terapan untuk Penelitian Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Rosni. (2017). *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat*. Banda Aceh: CV Nusa Media.
- Sari, L. (2019). *Metodologi Penelitian dan Konsep Populasi*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, & Riyanto. (2021). Analisis Pengeluaran Rumah Tangga Petani. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 45–58.
- Syechalad. (2009). *Ekonomi Perkebunan dan Pembangunan Pertanian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). New York: Pearson Education.
- Umi Latifah. (2018). *Sosiologi Pertanian*. Jakarta: Kencana.

- Yosef. Dalam Al Muksit (2017). Konsep Kesejahteraan dan Kemiskinan. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Zen, Z., Barlow, C., & Gondowarsito, R. (2016). Oil Palm Smallholder Development in Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 45, 134–142.
- Zulkifli. (2018). *Analisis Kesejahteraan Petani Perkebunan*. Padang: Universitas Andalas.